ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN PRINGSEWU DAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011-2013

(Skripsi)

Oleh

HANAFI NUGROHO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016

ABSTRACT

ANALYSIS OF FISCAL AUTONOMY IN PRINGSEWU AND PESAWARAN YEAR 2011-2013

By

HANAFI NUGROHO

Based on the law of Act Number 23 of 2014 on Local Government and Law Number 33 of 2004 on The Financial Balance Between Central and Local Governments. This legislation provides an opportunity for the region to explore the potential of local and improving financial performance, in order to realize the autonomy of the region based on regional autonomy. This study aims to determine the level of autonomy in Pringsewu and Pesawaran measured by the ratio of rate regional autonomy, The ratio of contributions regional revenue to fiscal autonomy, The ratio of Central Government's contributions assistance fiscal autonomy, Growth Ratio of Fiscal Autonomy, and factors that related to another fiscal autonomy in Pringsewu and Pesawaran.

The data used in this study is APBD on the period of 2011-2013, that data is based on Regional Revenue, Regional Expenditure, Transfers from the Central Government, and Regional Loan. The analysis technique used to answer this research is descriptive quantitative method. The results showed that the level of fiscal autonomy in Pringsewu and Pesawaran Regency showed a pattern of Instructive relationship or very low, but basically the ratio of the level fiscal autonomy in Pringsewu is higher than Pesawaran, the contribution of real regional revenue of the regional revenue is higher in Pringsewu than Pesawaran. While the level of dependence on central government aid in the Pesawaran Regency is Higher than at the level of dependence on Pringsewu Regency. Based on the findings of field factors relating to fiscal autonomy in Pringsewu and Pesawaran include the society participation, large of area, and the growth regional gross domestic product.

Keyword: Fiscal Autonomy

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN PRINGSEWU DAN KABUPATEN PESAWRAN TAHUN 2011 - 2013

OLEH

HANAFI NUGROHO

Berlandaskan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. undang-undang ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah berdasarkan pada otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian di Pringsewu dan Pesawaran yang diukur berdasarkan Rasio Tingkat kemandirian, Rasio Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal, Rasio Kontribusi Bantuan Pemerintah Pusat terhadap Kemandirian Fiskal, Rasio Pertumbuhan Kemandirian Fiskal, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian fiskal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD periode 2011-2013, di mana data tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah, Pengeluaran Daerah, Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran menunjukan pola hubungan instruktif atau sangat rendah, namun rata-rata rasio tingkat kemandirian fiskal di Pringsewu lebih tinggi dari pada Pesawaran, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah lebih tinggi di Pringsewu dari pada Pesawaran, sedangkan tingkat ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah Pusat di Kabupaten Pesawaran Lebih tinggi dari pada tingkat ketergantungan di Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan temuan di lapangan faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian fiskal di Pringsewu dan Pesawaran antara lain partisipasi masyarakat, luas wilayah, dan pertumbuhan produk domestik regional bruto.

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN PRINGSEWU DAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011-2013

Oleh

HANAFI NUGROHO

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016

Judul Skripsi	: **ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN PRINGSEWU DAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011-2013**
Nama Mahasiswa	: Hanafi Nugroho
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1216021050
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Yana Ekana PS, M.Si.
NIP 19610817 199003 1 004

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Drs. Yana Ekana PS, M.Si.** .....

   Penguji Utama : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Juni 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juni 2016
Yang Membuat Pernyataan,

Hanafi Nugroho
NPM. 1216021050

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 Juni 1994, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Hartono dan Ibu Yani Sudarmi Prihatiningsih.

Penulis mengawali pendidikanya pada tingkat Taman Kanak-kanak di TK Aisyah Bustanul Atfal Wonokriyo, setelah itu melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di SDN 4 Tambahrejo, dan setelah itu melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Gadingrejo, dan kemudian mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Gadingrejo dan diselesaikan pada tahun 2012. Dan di Tahun 2012 penulis diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri.

MOTTO

Bacalah
Dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan
Dia telah menciptakan dari segumpal darah
Bacalah,
Dan Tuhanmulah yang paling pemurah
Yang mengajarkan (manusia) dengan perantara kalam, Dia mengajarkan kepada
Manusia apa yang tidak diketahuinya

(Al-quran, Surat ke-96 : 1-5)

PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrahiim

Alhamduillahirabbil'alamiin, telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W.
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat
Sebagaimana Suri Tauladan yang diajarkan Kepada Kita

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada

Ayahanda ku Hartono dan Ibunda ku Yani Sudarmi Prihatiningsih, sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku. Terimakasih atas do'a dan restu yang telah diberikan. Semoga karya sederhana ini, dapat membuat bangga dan memberikan kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang telah dikerjakan

Terimakasih untuk Saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan Jannah dari Allah S.W.T.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judil " **Analisis Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2013"**.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng Prayitno Harianto, M.S., sebagai Rektor Universitas Lampung periode 2010-2015;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P sebagai Rektor Universitas Lampung periode 2015-2020;
3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si., sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Yana Ekana PS, M.Si., sebagai pembimbing Skripsi saya;
6. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., sebagai Dosen Penguji;
7. Ibu Tabah Maryamah, SIP, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis;

8. Seluruh dosen dan staff Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah bersedia untuk membimbing penulis dalam proses perkuliahan;
9. Seluruh narasumber penelitian yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Dinas Pendapatan Daerah, dan Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pringsewu dan Kabupeten Pesawaran yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data;
10. Ayahanda Hartono, SE. , lelaki yang selalu mengajarkan banyak hal baik dalam proses belajar maupun dalam proses bermasyarakat serta pemberi fasilitas yang luar biasa. Terimakasih atas doa dan kasih sayang bahkan tetesan keringat yang tiada hentinya untuk kesuksesan anak-anaknya;
11. Ibunda Dra. Yani Sudarmi Prihatiningsih, wanita yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendo'akan serta memiliki rasa cinta yang tulus luar biasa. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah ibunda berikan kepadaku untuk maju sebagai individu yang lebih baik;
12. Kakak Winda Meilya Utami, Amd.Keb. dan Adik M. Ustadi atas semangat, doa, dan dukungan yang telah diberikan hingga saat ini;
13. Teman seperjuangan Defi Yunia Sari, S.IP. yang selalu memberikan dukungan moril, spiritual, dan semangatnya untuk penulis hingga saat ini. Terimakasih atas kebersamaanya hingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan;
14. Teman-teman mahasiswa seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2012 yang selalu memberikan dukungan, semangat serta berbagi canda dan tawa. Terimakasih untuk pertemanan selama beberapa tahun ini. Tetaplah menjadi sahabat yang selalu merangkul dalam kondisi apapun;

15. Semua orang yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menilai sebagai amal dan ibdah atas semua kebaikan yang telah dilakukan. Dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca.

Amin

Bandar Lampung, 22 Juni 2016

Hanafi Nugroho

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kebijaksanaan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Pringsewu Dan Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2013"** tepat pada waktunya**.**

Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ilmu pemerintahan. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang saya miliki. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya, saya mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi pembaca.

Bandar Lampung, 22 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 9

II. TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Tinjauan Tentang Keuangan Daerah 11
B. Tinjauan Tentang Pendapatan Daerah 14
1. Pendapatan Asli Daerah 14
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 15
C. Tinjauan Tentang Dana Perimbangan 21
1. Dana Bagi Hasil 22
2. Dana Alokasi Umum 24
3. Dana Alokasi Khusus 26
D. Tinjauan Tentang Pengeluaran/Belanja Daerah 28
E. Tinjauan Tentang Desentralisasi Fiskal 30
F. Kemandirian Fiskal Daerah 37
G. Kerangka Pikir 43

III. METODE PENELITIAN **45**
A. Tipe dan Jenis Penelitian 45
B. Lokasi Penelitian 46
C. Variabel Penelitian 46
D. Definisi Konsep 47
E. Definisi Operasional 48
F. Jenis Data 52
G. Teknik Pengumpulan Data 52
H. Teknik Pengolahan Data 55
I. Teknik Analisis Data 57

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 59
A. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu 59
1. Gambaran Geografi 59
2. Gambaran Demografi 61
3. Gambaran Pendidikan 63
4. Gambaran Perekonomian 65
5. Gambaran Keuangan 67
B. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran 69
1. Gambaran Geografi 69
2. Gambaran Demografi 71
3. Gambaran Pendidikan 73
4. Gambaran Perekonomian 75
5. Gambaran Keuangan 77

V. HASIL DAN PEMBAHASAN..... 80
A. Kemandirian Fiskal Daerah 82
B. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal daerah 90
C. Kontribusi Bantuan Pemerintah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah 96
D. Rasio Pertumbuhan 101
E. Faktor-faktoor yang Berhubungan dengan Kemandirian Fiskal Daerah 105
1. Faktor Partisipasi Masyarakat 106
2. Faktor Luas Wilayah 126
3. Faktor PDRB Perkapita 129

VI. PENUTUP 133
A. Simpulan 133
B. Saran 135

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

01 Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten yang Lainya 4
02 Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Asli Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2013 6
03 Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Asli Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2013 7
04 Skala Interval Harsey & Blancard 39
05 Skala Interval Reksohadiprodjo 39
06 Tabel Pedoman Pengumpulan Data 54
07 Nama Kecamatan di Kabupaten Pringsewu 61
08 Persebaran Penduduk Di Kabupaten Pringsewu 62
09 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 62
10 Jumlah Sekolah, Guru, Murid,di Kabupaten Pringsewu 64
11 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan 65
12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Lapangan Usaha 66
13 Pendapatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2014 68
14 Pengeluaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2014 69
15 Nama Kecamatan di Kabupaten Pesawaran 71
16 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pesawaran 72
17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Pesawaran 72
18 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Pesawaran 75
19 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Lapangan Usaha 76
20 Pendapatan Kabupaten Pesawaran 2011-2014 78
21 Pengeluaran Kabupaten Pesawaran tahun 2011-2014 79
22 Perbandingan RKF Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran tahun 2011-2013 85
23 Rasio Belanja Rutin dan Pembangunan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2013 88
24 Kontribusi PAD Terhadap Kemandirian Fiskal di Pringsewu dan Pesawaran 93

25 Kontribusi Bantuan Pemerintah Pusat Terhadap Kemandirian Fiskal Di Pringsewu dan Pesawaran 99
26 Rasio Pertumbuhan Kemandirian Fiskal 103
27 Pendapatan PBB..... 107
28 Pendapatan Pajak Restoran..... 111
29 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan 113
30 Pendapatan Pajak Reklame..... 115
31 Pendapatan Pajak Mineral..... 117
32 Pendapatan Pajak BPHTB 118
33 Pendapatan Retribusi Dinas Kebersihan Pasar dan Taman 120
34 Pendapatan Retribusi Dinas Pehubungan 122
35 Pendapatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil..... 124
36 Perbandingan PDRB tahun 2011 - 2013..... 131

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

01 Kerangka Pikir 44
02 Perbandingan RKF Pringsewu dan Pesawaran 85
03 Perbandingan RBR dan RBP Pringsewu dan Pesawaran..... 88
04 Kontribusi PAD terhadap kemandirian fiskal Pringsewu dan Pesawaran..... 94
05 Kontribusi bantuan pemerintah terhadap penerimaan Pringsewu dan Pesawaran 100
06 Rasio pertumbuhan PAD di Pringsewu dan Pesawaran..... 104
07 Perbandingan PDRB 2012 dan 2013 di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran..... 131

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi desentralisasi fiskal dapat ditemui beberapa hambatan yang terjadi. Salah satu diantaranya adalah adanya disparitas atau kesenjangan pendapatan/kapasitas fiskal dengan kebutuhan pengeluaran/kebutuhan fiskal pada berbagai tingkatan pemerintahan. Ketidakseimbangan seperti ini akan berakibat fatal bagi upaya mengoptimalkan pembangaunan dan pelayanan publik di pemerintah daerah.

Uraian di atas disebut sebagai ketimpangan fiskal daerah. Pada kajian ini, penulis akan mencoba mengkaji ketidakseimbangan fiskal horizontal antara kabupaten otonom baru di daerah Lampung, khususnya Kabupeten Pringsewu dengan Kabupaten Pesawaran.

Ketidakseimbangan fiskal horizontal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pemerataan dan keseimbangan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan publik. Terlebih lagi apabila dalam realisasi anggaran tidak difokuskan untuk kepentingan pelayanan publik, fakta yang

terjadi adalah realisasi anggaran cenderung lebih besar dihabiskan guna belanja pegawai dan untuk pelaksanaan penarikan sumber pendapatan daerah bukan untuk kepentingan publik.

Potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berbeda pada setiap kabupaten juga menimbulkan perbedaan tingkat kemandirian suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang ada pada masing-masing daerah, baik itu fasilitas akses jalan maupun fasilitas pengembangan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Selain itu, pola hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu hal yang ditimbulkan dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya reformasi pengelola keuangan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud antara lain yakni dalam hal pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan pengeluaran/belanja daerah. Oleh sebab itu yang menjadi tolak ukur yang akan di lihat dalam kemandirian keuangan daerah adalah pengelolaan penerimaan daerah.

Hal lain yang ditimbulkan dari adanya otonomi daerah adalah terjadinya desentralisasi yang merupakan sebuah asas yang hari ini banyak negara di dunia menggunakannya dalam sistem pemerintahannya baik itu negara federal ataupun negara kesatuan. Asas ini merupakan salah satu asas yang

terkandung dalam tubuh otonomi daerah. Ketika otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah pusat pada awal tahun 2001, banyak pihak mempertanyakan apakah secara otomatis pencanangan itu akan menimbulkan perubahan paradigma yang mendasar terkait hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Setelah di berlakukanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tantang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya otonomi daerah ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pusat. Namun faktanya pemerintah daerah selalu mengalami minus anggaran dalam pembiayaan rumah tangganya, hal ini disiasati dengan diberinya dana perimbangan yang diberi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran merupakan daerah otonom baru yang memiliki tanggung jawab memberdayakan potensi daerah sesuai prakarsa daerahnya sendiri yang berdasarkan asas transparansi, partisipasi masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan mandiri. Salah satu upaya guna mencapai pemerintahan yang baik dan mandiri tersebut salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar.

Berlandaskan Pasal 8, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kebupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. Kedua kabupaten otonom baru tersebut memiliki persamaan kewenangan wajib yakni melakukan pembangunan daerah sesuai dengan prakarsa daerah yang bersangkutan. Dengan adanya peraturan tersebut Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran berhak melakukan otonomi daerahnya dan mengelola kebijakan anggaranya sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing dalam rangka kemandirian fiskal daerah.

Indikator kemandirian daerah tersebut dapat dilihat dari segi pengeluaran dan pendapatan daerah yang bersangkutan, yang dimana pengeluaran lebih kecil dari pendapatan daerah yang bersangkutan. Berikut merupakan tabel perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran daerah Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten yang lain yang ada di Lampung.

Tabel. 01 Perbandinngan antara pendapatan dan pengeluaran daerah Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten yang lainya (dalam juta rupiah)

Daerah	Penerimaan			Pengeluaran		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Pringsewu	611.621	738.447	784.516	577.092	725.997	772.327
Pesawaran	628.537	676.345	782.644	570.373	672.391	822.432
B. Lampung	1.187.872	1.459.472	1.688.412	1.152.956	1.464.165	1.779.126
Lampung Selatan	1.010.277	1.129.151	1.198.780	926.313	1.117.185	1.163.925
Lampung Tengah	1.271.770	1.511.325	1.613.954	1.274.212	1.455.637	1.612.488
Metro	513.712	551.001	618.314	514.797	518.616	609.265

Sumber:http://djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006, diakses, selasa 22 September 2015 pukul 12:45 wib

Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan dan pengeluaran Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran relatif mengalami peningkatan setiap tahun. Alasan yang mendasari penulis untuk meneliti kemandirian fiskal Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran karena Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten otonom baru yang memiliki tingkat pendapatan yang sifatnya selalu mengalami peningkatan setiap tahun dan diikuti dengan meningkatanya pengeluaran/belanja daerah setiap tahunnya.

Berdasarkan segi pendapatan dan pengeluaran kedua daerah ini, Kabupaten Pesawaran terlihat memiliki selisih perbedaan yang hampir sama dengan Kabupaten Pringsewu, namun Kabupaten Pesawaran terlihat lebih berkembang dibanding kabupaten Pringsewu. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang ada pada kedua kabupaten tersebut, dimana fasilitas kabupaten Pesawaran lebih berkembang seperti akses transportasi yang sudah memadai hingga pelosok desa dan fasilitas pengembangan sumber daya manusia yang memang diperuntuhkan untuk pengembangan masyarakat miskin.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kemandirian fiskal Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran selain dilihat dari segi pendapatan dan pengeluaran adalah dari segi dana perimbangan kedua kabupaten tersebut. Dana perimbangan tersebut merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang bersangkutan dalam rangka untuk memenuhi kekurangan pemerintah daerah dan sebagai dana pembantu untuk kemandirian daerah yang bersangkutan. Berikut ini

adalah Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 hingga 2013.

Tabel. 02 Dana Perimbangan Dan Penerimaan Pendapatan Asli Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2013 (dalam juta rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah				Dana Perimbangan		
	Pajak Daerah	Retribusi daerah	Lain-lain	Total	DAU	DAK	TDT
2011	5.152	1.691	12.627	19.471	368.176	59.368	459.968
2012	7.684	1.964	18.273	27.946	443.529	91.917	572.910
2013	8.476	2.446	23.920	34.886	499.454	57.508	592.098

Sumber: http://djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006, diakses selasa, 22 September 2015 pukul 12:51 wib

Berdasarkan tabel di atas, kemandirian Kabupaten Pringsewu sudah terlihat dari angka pendapatan asli daerahnya yang selalu mengalami peningkatan. berdasarkan data pada tabel rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2012 meningkat sebesar 27,94 persen. Angka tersebut merupakan angka besar dalam memandirikan daerahnya khususnya pada rasio pertumbuhan PAD. Begitu pula dengan tahun selanjutnya, yakni pada tahun 2013 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Pringsewu meningkat sebesar 34,88 persen.

Dapat disimpulkan bahwa Kabupeten Pringsewu sudah dapat berkembang dari tahun ketahun. Berdasarkan penjelasan tabel sebelumnya, mengindikasikan bahwa Kabupaten Pringsewu mendesain anggaran APBD dengan desain anggaran dinamis, yang dimana suatu daerah merancang anggaran yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu pula dengan \desain dana transfer yang mengikuti kenaikan setiap tahun.

Tabel. 03 Dana Perimbangan Dan Penerimaan Pendapatan Asli Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2013 (dalam juta rupiah)

Tahun	Pendapatan Aseli Daerah				Dana Perimbangan		
	Pajak Daerah	Retribusi daerah	Lain-lain	Total	DAU	DAK	TDT
2011	5.672	1.608	10.605	17.916	372.577	68.625	479.063
2012	5.652	1.220	18.701	25.710	476.870	57.108	574.542
2013	6.041	1.885	18.005	25.993	538.309	66.613	642.231

Sumber:http://djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006, diakses minggu, 11 Oktober 2015 pukul 11:32 wib

Berdasarkan di atas, kemandirian Kabupaten Pesawaran terlihat mengalami sedikit kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari rasio pertumbuhan PAD yang mengalami penaikan pada tahun 2012, namun mengalami sedikit melambat pada tahun 2013. Pada tahun 2012 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran mengalami kenaikan sebesar 25,71 persen dari tahun yang sebelumnya. Namun, melambat pada tahun berikutnya, pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran pada tahun 2013 mengalami perlambatan PAD dengan persentase pertumbuhan PAD sebesar 25,94 persen.

Berdasarkan tabel. 02 dan tabel. 03, dapat diketahui bahwa Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran selalu di ikuti dengan jumlah dana perimbangan yang selalu mengalami peningkatan. Tetapi, peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah tidak berarti apabila tidak terealisasikan dengan baik. Pendapatan yang sudah terkumpul cenderung direalisasikan untuk pembiayaan belanja pegawai bukan untuk kepentingan publik, yang seharusnya pembiayaan untuk pengembangan daerah adalah untuk kepentingan masyarakat.

Kenaikan angka pendapatan asli daerah dapat mengindikasikan bahwa suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki masyarakat partisipatif dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan kenaikan jumlah pendapatan asli daerah mengindikasikan bahwa masyarakat sudah sadar akan kewajiban membayar pajak dan retibusi daerah. Oleh karena itu, kemandirian daerah tidak hanya menjadi tugas pemerintah, masyarakat juga memiliki fungsi untuk ikut berpartisipasi dalam memandirikan daerah.

Berdasarkan penjelasan tabel perbandingan dana perimbangan kedua kabupaten, dapat diketahui perbandingan dana perimbangan dari pusat untuk Kabupaten Pringsewu dan Kabupeten Pesawaran memiliki selisih yang tidak begitu besar. Begitu pula dengan selisih pendapatan asli kedua kabupaten tersebut yang tidak begitu besar, namun pada faktanya Kabupaten Pesawaran lebih berkembang dari Kabupaten Pringsewu. Pembicaraan yang seperti ini yang menjadi topik menarik untuk di bahas mengenai tingkat kemandirian fiskal antara Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2011-2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran tahun 2011-2013?
2. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kemandirian fiskal Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran tahun 2011-2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran tahun 2011-2013.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian fiskal Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran tahun 2011-2013.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi, ilmiah dan kontribusi yang nyata bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan terutama dalam bidang Keuangan Daerah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran sebagai pelaksana desentralisasi fiskal dalam mengelola keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni yang tertuang dalam pasal 1 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditemukan kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Dimana hak merupakan hak daerah dalam mencari sumber pendapatan beruapa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban daerah adalah kewajiban daerah guna mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah yang ada di daerah.

Faktor utama dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan kata lain faktor-faktor keuangan dapat mempengaruhi tingkat

kemampuan daerah dalam melaksanakan proses otonomi. Pamudji (Kaho, 1997:139) menegaskan:

> "Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri".

Sementara itu, dalam rangka memiliki keuangan daerah yang memadai, maka daerah akan membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Lains (Kaho, 1997:139-140) beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendapatkan kas daerah, antara lain:

1. Daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat;
2. Daerah dapat melakukan peminjaman dari pihak ketiga melalui pemerintah pusat;
3. Pemerintah daerah dapat ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut melalui daerah, misalnya sekian persen dari total pendapatan sentral melalui bagi hasil;
4. Pemerintah daerah dapat menambahkan tarif pajak tertentu;
5. Pemerintah daerah menerima bantuan dalam bentuk subsidi dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan keuangan daerah diperlukan adanya perencanaan agar seluruh kegiatan dan kebijakan dapat dikelola dengan optimal. Perencanaan keuangan daerah seperti ini yang dikenal dengan istilah APBD atau Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah, seperti yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. APBD merupakan suatu anggaran tahunan daerah yang penetapanya berdasarkan peraturan daerah.

Pada dasarnya APBD berada pada tingkat Daerah. Menurut (Adisasmita, 2011: 78) apabila daerah menetapkan anggaran yang sifatnya *ekspansif*, maka APBD akan diprioritaskan guna mengoptimalkan perekonomian daerah tersebut melalui development budget atau pengeluaran pembangunan, namun jika daerah menetapkan anggaran yang sifatnya kontraktif, maka APBD tidak dapat guna menggerakan perekonomian daerah tersebut. Hal ini dikarenakan anggaran pembangunan daerah tersebut jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan belanja rutin.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD merupakan suatu sarana yang dimana dapat menjadi alat dalam proses otonomi daerah yang real dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah fungsi APBD (Mardiasmo, 2003: 98) :

1. Menentuakan jumlah pajak yang diberikan kepada masyarakat;
2. Sebagai sarana mewujudkan otonomi daerah;
3. Memberi tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya kepala daerah. Hal ini disebabkan karena APBD merupakan wujud dari seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah;

4. Sebagai sarana pengawasan terhadap suatu daerah; dan
5. Sebagai sarana pemberian kuasa untuk kepala daerah dalam batasan yang ditentukan.

Pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka desentralisasi, hal ini sudah diatur secara detail dalam Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, yang menyatakan dalam pelaksanaan desentralisasi daerah, pemerintah daerah berhak menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.

B. Tinjauan tentang Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang sifatnya mutlak dan diakui sebagai suatu sumber penambahan nilai kekayaan daerah dalam suatu periode. Pendapatan daerah merupakan suatu wujud dari adanya otonomi daerah yang dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif.

Menurut Ahmad Yani (2002:39), untuk melaksanakan fungsi otonomi daerah, daerah harus memiliki dukungan atau sumber pendapatan daerah yang memadai. Beberapa sumber pendapatan daerah tersebut antara lain yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah

   Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan dana belanja suatu daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18, menyatakan bahwa

> "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesui dengan peraturan perundang-undangan".

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dana pembangunan suatu daerah, namun pada faktanya belum cukup untuk membiayai pembangunan dalam rangka pertumbuhan suatu daerah, hal ini mewajibkan pemerintah daerah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya terutama dalam hal pendapatan aseli daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Hal ini bertujuan guna memberikan kebebasan kepada daerah dalam mencari pendapatan dalam rangka pelaksanaan otonomi suatu daerah dan sebagai perwujudan dari asas desentralisasi negara.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa "Daerah berhak

menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggrakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah" (pasal 17, ayat 1).

Adanya wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi suatu daerah dengan cara mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secar baik, terutama pendapatan aseli daerah sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, didalam pasal 6 (Darwin , 2010:45) , menjelaskan sumber-sumber PAD antara lain adalah:

a. Hasil pajak daerah

   Pajak Merupakan pungutan yang diambil oleh pemerintah daerah dari semua obyek pajak, sperti pajak benda bergerak dan benda tidak bergerak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan tidak digunakan guna keperluan daerah begi besar-besarnya kemakmuran rakyat .

   Pemerintah daerah memiliki hak dalam melakukan pungutan kepada masyrakat, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 A yang

menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang”. Dalam hal ini pungutan Daerah yang sifatnya memaksa berupa pajak dan retribusi daerah. Dengan ciri-ciri pajak yang sebagai berikut:

1. Pajak daerah dan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan-undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya;
4. Hasil pungautan pajak daerah dipergunakan guna membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah untuk membiayai belaja daerah.

b. Retribusi daerah

Menurut Ichlasul & Colin (1995), Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran izin tertentuu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 108, menyebutkan bahwa yang termasuk Objek Retribusi antara lain:

1. Jasa umum;
2. Jasa usaha; dan

3. Perizinan tertentu.

Menurut Gunawan & Sitompul (1984:78), Jasa umum adalah jasa yang difasilitasi oleh pemerintah daerah yang ditujukan untuk umum dan dinikmati oleh semua orang atau badan tertentu, Sedangkan jasa usaha merupakan jasa yang difasilitasi oleh pemerintah daerah yang bersifat komersial. Ciri-ciri retribusi daerah yakni:

1. Dipungut oleh daerah yang bersangkutan;
2. Dalam pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan oleh daerah; dan
3. Retribusi bersifat memaksa kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan suatu daerah yang dilepaskan dan dipertanggungjawabkan melalui APBD yang bertujuan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri sesuai dengan prakarsa daerah dan kebijakan daerah yang bersangkutan.

Menurut Maris (1984:98), Hasil laba daerah adalah salah satu pendapatan daerah yang modal seluruh atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Daerah dapat mendirikan perusahaan yang tujuannya untuk menambah penghasilan daerah tersebut. Semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dibangun oleh daerah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk

membangun daerahnya sendiri dan membangun perekonomian nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan daerah merupakan suatu alat atau bagian yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pendapatan daerah. Perusahaan daerah bersifat memberikan jasa dalam kepentingan umum, bukan untuk mencari kepentingan profit. Dengan kata lain perusahaan daerah menjalankan fungsi stabilitas antara sektor ekonomi dan sektor sosial daerah.

Walaupun perusahaan daerah dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah, namun hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah merupakan suatu alat yang dapat memberikan kontribusi bagi kekuatan keuangan suatu daerah secara maksimal. Kebanyakan perusahaan daerah berada dalam kawasan kota-kota besar, namun untuk daerah-daerah kecil keberadaan perusahaan daerah masih dirasakan minim. Hal ini akan berdampak bagi pemasukan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26, dalam (Haris, 2007:112), Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan terdiri dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada suatu perusahaan milik daerah atau BUMD;

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN;
3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan swasta.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pasal 26 ayat 4 (Haris, 2007:112), menyebutkan lain-lain PAD yang sah sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf d, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga atau interest;
4. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Pendapatan asli daerah diperoleh berdasarkan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dimana prosesnya dipungut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan tersebut diperoleh dari hasil kekayaan yang berada didalam wilayahnya sendiri. Adanya PAD

bagi suatu daerah bertujuan guna memberikan wewenang kepada pemerintah daerah guna mendanai otonomi daerah tersebut sesuai potensi daerah sebagai wujud dari desentralisai.

Namun, Menurut Mahi (Suparmoko, 2000: 58), PAD belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan daerah, hal ini disebabkan oleh hal berikut:

1. Masih rendahnya pajak dan retribusi daerah;
2. Peranya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah;
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah;
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang tergolong lemah.

C. Tinjauan tentang Dana Perimbangan

Ahmad Yani (2002:40), dana perimbangan merupakan dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Penerimaan Belanda Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain itu dana perimbangan dibutuhkan untuk tujuan mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang lainya.

Menurut Sukirno (2002:90), dana perimbangan adalah salah satu dari sumber pendapatan daerah yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam pemberian otonomi kepada daerah yang tidak lain

penggunakaannya untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan agar masyarakat didaerah menjadi lebih baik. Dana perimbangan merupakan sumber pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasi pendanaanya tidak dapat dipisahkan dengan yang lain, mengingat jenis-jenis penerimaan daerah yang lain merupakan satu kelompok yang saling mengisi dan melengkapi.

Penetapan hak pemerintah provinsi dan daerah kabupaten atau kota diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah pasal 10 yang menerangkan bahwa hak pemerintah provinsi dan daerah kabupaten atau kota antara lain terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil

   Dana bagi hasil merupakan bagian penerimaan daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana bagi hasil adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang pada dasarnya bersifat memperhatikan potensi daerah penghasil.

   a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

      Pembagian peneriman negara dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) terdiri dari 90 persen untuk daerah dan 10 persen untuk pemerintah pusat, dengan rincian sebagai berikut:

      1. 64,8 persen untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan kerekening daerah kabupaten/kota;

2. 16,2 persen untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan kerekening daerah provinsi; dan
3. 9 persen untuk biaya pemungutan dan disalurkan kerekening pemerintah pusat dan kas daerah.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pembagian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam penerimaan negara terbagi atas 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:

1. 64 persen untuk daerah kabupaten atau kota penghasil dan disalurkan ke rekening daerah kabupaten atau kota
2. 16 persen untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan kerekening provinsi.

Bagian pemerintah pusat melalui penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten atau kuota diseluruh Indonesia. Pembagian pengalokasian didasarkan pada realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan banguanan tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagian Daerah Dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Pembagian dalam bagi hasil bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam dari sektor pertambangan umum, sektor perikanan, dan

sektor kehutanan, dibagi dengan imbang yakni 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pemerintah pusat.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum atau DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk pembiayaan kebutuhan pengeluaran daerah. Dalam penggunaanya, dana alokasi umum sepenuhnya ditetapkan oleh daerah. Pemerataan kemampuan keuangan daerah merupakan jaminan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan keoada masyarakat.

Menurut Yani, Ahmad (2002:110), dana alokasi umum merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dimana penggunaan dana alokasi umum (DAU) dalam APBD, tidak lain adalah untuk pencapaian tujuan pemberian hak otonomi kepada daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik seperti pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.

Besaran dana alokasi umum atau DAU adalah sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Penerimaan dalam negeri yang dimaksud adalah penerimaan kas negara yang bersumber dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi oleh penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah kabupaten atau kota yang telah ditetapkan dalam APBN. Dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Porsi daerah kabupaten/kota merupakan proporsi bobot daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten atau kota diseluruh indonesia.

Menurut Yani, Ahmad (2002:113), Bobot suatu daerah ditentukan berdasarkan hasil kajian yang empiris dengan memperhitungkan beberapa variabel-variabel relevan berikut:

a. Kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variable jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin,
b. Potensi daerah yang antara lain dapat di cirikan dengan potensi penerimaan yang diterima oleh daerah seperti potensi sumberdaya alam, potensi industri, dan potensi sumber daya manusia di suatu daerah tersebut.

Perumusan dan perhitungan dana alokasi umum dilakukan oleh sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah juga melakukan penyusunan dan menjaga kemutakhiran data yang merupakan variabel daerah yang menjadi bobot perhitungan dalam menentuakan DAU

disuatu kabupaten/kota. Oleh sebab itu, maka sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan lembaga yang objektik dan independen dalam pengalokasian dana perimbangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Syamsi, 1994:77), jumlah DAU dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan di APBN tahun anggaran yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 25% dari proyeksi penerimaan dalam negeri setelah dikurangi alokasi bagi hasil. Alokasi untuk provinsi sebesar 10% dan alokasi untuk kabupaten atau kota sebesar 90%.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari anggaran APBN, yang dialokasikan untuk daerah guna membantu pembiayaan kebutuhan yang sifatnya khusus atau tertentu. Dana alokasi khusus adalah salah satu dari bagian dana perimbangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Ahmad Yani (2002:126), Dana alokasi khusus dana yang dialokasikan dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) kepada daerah maupun kabupaten/kota tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan daerah maupun kabupaten/kota yang bersifat khusus, dengan memperhatikan kecukupan dana dari APBN. Dana

Alokasi Khusus pengalokasianya harus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, hal ini berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunya.

Menurur Khusaini (2006:91) Dana alokasi khusus (DAK) digunakan untuk keperluan pembiayaan investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik yang sifatnya jangka panjang. Dana alokasi khusus (DAK) dapat membantu pembiayaan operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu dalam periode tertentu dan tidak lebih dari 3 tahun. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus yaitu:

a. Kebutuhan yang merupakan prioritas nasional

   Yang termasuk prioritas nasional antara lain pembiayaan reboisasi daerah, proyek yang dibiayai oleh lembaga donor dan proyek-proyek kemanusiaan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia.

b. Kebutuhan yang tidak dapat dialokasikan dengan dana alokasi umum

   Kebutuhan yang tidak dapat dialokasikan secara umum adalah kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah yang lain. Misalnya kebutuhan beberapa jenis investsi/prasarana baru, kebutuhan pada daerah transmigrasi, pembangunan saliran irigasi primer, kebutuhan pembangunan jalan pada daerah terpencil dan lain-lain.

Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai oleh DAK ditetapkan oleh menteri teknis atau instansi terkait. Menteri teknis/instansi terkait setelah

berkonsultasi dengan dewan pertimbangan otonomi daerah menetapkan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) disesuaikan dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Jenis-jenis kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi khusus adalah biaya persiapan proyek fisik, biaya administrasi, biaya pelatihan, biaya penelitian, biaya perjalanan dinas atau perjalanan pegawai daerah dan lain-lain biaya umum sejenisnya.

Pemantauan dan pemeriksaan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dilakukan oleh menteri teknis/instansi terkait dengan melakukan pemeriksaan segi teknis terhadap kegiatan yang telah dibiayai oleh DAK. Pemantauan tersebut bertujuan agar memastikan bahwa kegiatan yang telah dibiayai oleh DAK dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Dan hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tinjauan tentang Pengeluaran/Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo (2004:137), belanja daerah adalah semua pengeluaran yang bersumber dari kas daerah dan merupakan kewajiban pada suatu daerah yang bertujuan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Pengeluaran atau belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pengeluaran/belanja langsung daerah merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah daerah. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah daerah.

Menurut Saragih (Mardiasmo 2004:140), komposisi APBD daerah harus disesuaikan dengan perkembangan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Setiap pengeluaran daerah haruslah diimbangi dengan kemampuan pendapatan daerahnya, khususnya PAD. Hal yang terjadi apabila pemerintah menetapkan kebijakan defisit anggaran maka sumber pembiayaan yang dapat membantu daerah tersebut untuk menutupi pembiayaan daerah berasal dari pinjaman, baik itu pinjaman dalam negeri maupun luar negeri melalui pemerintah pusat.

Berdasarkan pemaparan di atas pemerintah daerah lebih aman apabila tidak mendesain anggaran daerahnya yang bersifat defisit. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan kemampuan pendapatanya agar dapat menutupi segala sumber pembiayaan daerah. Pemerintah daerah dapat bangkrut apabila suatu daerah terlalu berambisi memperbesar pengeluaran daerah baik belanja rutin maupun belanja untuk pembangunan daerah.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk membuat APBD yang baik dan optimal adalah dengan meminimalisir atau memperkecil belanja rutin daerah yang sifatnya memperkecil pengeluaran yang tidak mendesak. Disinilah pemerintah daerah harus menerapkan sistem anggaran yang

berbasis kinerja, yang dimana anggaran berbasis kinerja dilihat dari penilaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan besaran dana yang terserap dari suatu kegiatan yng dilakukan oleh pemerintah daerah.

Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dapat menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah tersebut atau menambah nilai kemakmuran masyarakat daerah tersebut. Selain itu sistem penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah menghadapi beberapa fungsi, seperti fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

E. Tinjauan Tentang Desentralisasi Fiskal

Menurut Nurcholis (2005:9), Desentralisasi berasal dari bahasa latin, yakni *De* yang diartikan sebagai lepas dan kata *Centrum* yang diartikan sebagai pusat. *Decentrum* dapat diartikan sebagai melepas dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi yang semula berasal dari sentralisasi yang mendapat awalan de maka berarti melepaskan dari hirarki pusat. Namun, desentralisasi tidak memutuskan diri dari pemerintah pusat, hanya melepaskan diri dari pemerintah pusat dan membangun prakarsa daerahnya sendiri.

Menurut widjaja (2014:41), desentralisasi merupakan sebuah bentuk penyerahan wewenang yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan kewenangan ini bertujuan untuk mengurusi rumah tangga daerah sesuai dengan prakarsa daerah. Konsep desentralisasi merupakan suatu

formulasi yang dapat membantu memecahkan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dengan adanya desentralisasi dapat memberikan kekuasaan pada bagian terbawah pada sistem pemerintahan. Pada pekembangannya desentralisasi dibagi menjadi beberapa konsep, antara lain yakni:

1. Political Decentralization

   Menurut Nurcholis (2005:4) Political decentralization dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkunganya. Political decentralitation disebut juga sebagai pemberian kewenangan kepada daerah dalam membuat keputusan dan pengawasan tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada instansi-instansi daerah. Dengan adanya konsep political dezentralitation diharapkan rakyat dapat menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu dalam ikut serta didalam pemerintahan daerahnya.

2. Administrative Decentralization

   Menurut Nurcholis (2005:10), desentralisasi administratif merupakan adanya pelimpahan wewenang untuk mendistribusikan tanggung jawab, dan sumber keungan yang dapat digunakan untuk pelayanan publik. Tanggung jawab yang dimaksud dalam hal ini adalah perencanaan, pendanaan dan pelimpahan manajemen fungsi pemerintah dari pemerintah pusat kepada aparatnya yang ada di daerah. Desentralisasi administratif dapat dikelompokan menjadi tiga, yakni:

a. Dekonsentrasi, yang dimaksud dengan dekonsentrasi yakni adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada para pejabat yang berada pada hirarki dengan pemerintah pusat di daerah.
b. Devolusi, merupakan pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintah dan pemerintah daerah mendapat kebijakan yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, maka pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut.
c. Pendelegasian, merupakan pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisai atau institusi tertentu diluar struktur birokrasi yang dikontrol oleh pemerintah pusat. Institusi tersebut memiliki discretion atau keleluasaan dalam melaksanakan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terbesar tetap pada pamerintah pusat selaku pemberi wewenang.

3. Fiscal Dezentralization

Fiscal decentralization merupakan sistem yang bertujuan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang keuangan, serta diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri.

4. Economic or Market Dezentralization

   Pada dasarnya desentralisasi ekonomi atau pasar merupakan pemberian atau pengalihan tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah dari sektor publik kepada sektor privat atau swasta. Melalui pemerintah pusat memberikan wewenang kepada sektor swasta untuk membantu pemerintah dan mengelola apa yang telah di mandatkan pemerintah kepada sektor swasta.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka konsep desentralisasi memberikan dampak baik dalam penguatan finansial maupun legal pada suatu daerah. Penjabaran tersebut didasari karena dengan adanya desentralisasi daerah dapat dapat mengatur dirinya sendiri dan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan daerahnya. Dengan diberlakukanya sistem desentralisasi maka aktivitas yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat maka dapat diserahkan kepada unit-unit pemerintah yang ada di daerah. Namun, yang menjadi formulasi dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal, hal ini dikarenakan pada skripsi ini penulis mencoba menelaah kemandirian daerah menggunakan pendekan Fiscal Decentralization.

Sebelum masuk pada pembahasan desentralisasi fiskal, ada beberapa konsep fiskal yang perlu diketahui. Kata Fiskal berasal dari bahasa latin yakni *fiscus* yang merupakan nama dari seorang pemegang keuangan pada zaman kekaisaran romawi yang secara harfiah *fiscus* diartikan sebagai “keranjang atau “tas”. Selain dari bahasa latin fiskal juga berasal dari bahasa inggris *fisc* yang dapat diartikan sebgai perbendaharaan negara maupun kerajaan.

Berdasarkan penjelasan fiskal sebelumnya maka dapat ditarik arti fiskal adalah suatu bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan oleh pemerintah dan kemudian digunakan sebagai pengeluaran negara dalam melaksanakan roda pemerintahan pada suatu negara.

Menurut Widjaja (2014:43), fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mendapatkan sumber dana yang dapat digunakan untuk pembangunan suatu negara maupun daerah. Dengan demikian kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran. Di lihat dari segi pendapatan dan pengeluaran kebijakan fiskal dibagi menjadi empat, yakni:

1. Kebijakan anggaran seimbang

   Kebijakan ini merupakan kebijakan yang mendesain pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Penyusunan anggaran belanja pemerintah tidak boleh melebihi dari jumlah penerimaan yang pemerintah dapatkan. Dengan demikian pemerintah dapat menekan angka pinjaman yang dapat memperburuk keadaan perekonomian.

2. Kebijakan anggaran surplus

   Kebijakan anggaran surplus merupakan salah satu kebijakan fiskal dengan mendesain pengeluaran yang lebih rendah dari penerimaan. Kebijakan surplus ini dilakukan guna tujuan agar pemerintah dapat menekan angka inflasi yang dapat memperburuk perekonomian negara maupun daerah. Dengan meminimalisir pengeluaran daerah maka suatu daerah akan dapat

memiliki anggaran yang lebih besar dan dapat dipergunakan untuk pembangunan pada periode yang berikutnya.

3. Kebijakan anggaran defisit

   Kebijakan angaran defisit merupakan salah satu kebijakan fiskal dengan cara mendesain pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Hal lain yang ditimbulkan dari desain anggaran ini adalah akan terjadinya defisit anggaran atau suatu daerah akan mengalami kekurangan anggaran. Kebijakan defisit anggaran dilakukan oleh pemerintah pada saat suatu daerah sedang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu pemerintah bahkan dapat melakukan pinjaman baik pinjaman yang berasal dari dalam negri maupun pinjaman yang berasal dari luar negri melalui pemerintah pusat guna menutupi kekurangan anggaran dalam proses pembangunan tersebut.

4. Kebijakan anggaran dinamis

   Kebijakan anggaran dinamis merupakan salah satu desain anggaran yang dilakukan dengan cara menambah jumlah pendapatan dan pengeluaran setiap tahunnya. Sehingga dapat dilihat jumlah pendapatan dan pengeluaran akan semakin bertambah setiap tahun. Kebijakan anggaran dinamis perlu dilakukan karena semakin banyaknya kegiatan pembangunan dan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah perlu merancang kebijakan anggaran yang bersifat dinamis.

Berdasarkan penjelasan desentralisasi dan penjelelasan fiskal sebelumnya, maka desentralisasi fiskal merujuk kepada adanya pemisahan dan pelimpahan urusan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerah guna mengoptimalkan otonomi daerah. Pemisahan yang dimaksud adalah pelimpahan urusan pendapatan dan pengeluaran daerah.

Di sisi pendapatan, adanya desentralisasi fiskal ini diharapkan daerah memiliki kewenangan tax policy untuk menarik pedapatan sesuai dengan prakarsa daerah. Di sisi pengeluaran, adanya desentralisasi fiskal bertujuan agar daerah memiliki kewenangan untuk menggunakan dana kas daerah maupun dana perimbangan.

Menurut Elmi (bahan ajar Politik Keuangan Daerah, 2014:139), desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan di bidang keuangan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatanya. Desentralisasi fiskal adalah salah satu komponen desentralisasi yang mekanismenya menggunakan transfer dana dari anggaran negara untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus pada aktifitas perekonomian daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan akan tercipta pemerataan kemandirian keuangan antar daerah .

Pelimpahan kewenangan keuangan kepada daerah merupakan salah satu instrumen dalam proses desentralisasi. Desentralisasi fiskal dapat dikatakan sebagai salah satu pilar untuk menunjang kestabilan perekonomian baik di

daerah maupun kestabilan nasional. Hal ini dikarenakan adanya dana transfer dari pusat ke daerah akan menciptakan aktivitas perekonomian yang baik di tingkat daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menegaskan bahwa sumber-sumber pembiayaan daerah dalam upaya desentralisasi fiskal antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah dan pinjaman daerah. Sumber-sumber keuangantersebut merupakan faktor keuangan utama yang merupakan sumber daya finansial dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

F. Kemandirian Fiskal Daerah

Menurut Kaho, 2005 (bahan ajar Politik Keuangan Daerah, 2014:140), kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya faktor keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dapat dikatakan bahwa keuangan daerah merupakan sentral dari adanya penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu kemajuan daerah sangatlah bergantung pada besar kecilnya keuangan daerah yang bersangkutan.

Menurut Halim 2004 (bahan ajar Politik Keuangan Daerah, 2014:140), ada beberapa ciri utama suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah, ciri-ciri daerah tersebut antara lain yakni:

1. Adanya kemampuan keuangan daerah

   Kemampuan keuangan daerah berarti daerah tersebut memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan daerah, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan

2. Minimnya ketergantungan kepada pemerintah pusat

   Ketergantungan kepada bantuan pusat haruslah seminimal mungkin, oleh sebab itu, pendapatan asli daerah (PAD) haruslah menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kemampuan daerah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam praktik pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran kemampuan daerah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan skala desentralisasi fiskal.

Menurut Halim 2004 (bahan ajar Politik Keuangan Daerah, 2014), indikator rasio kemandirian daerah dapat diukur menggunakan rasio perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bantuan pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD), bantuan pemerintah pusat dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) yang sudah di hitung dan dinyatakan dalam skala persentase. Menurut Fadhillah sebagai pedoman

dalam melihat pola hubungan dengan kemandirian daerah dari segi keuangan, mengklasifikasikan skala interval kemandirian daerah menggunakan teori Harsey dan Blanchard (Halim, 2004: 189) sebagai berikut:

Tabel. 04 Skala Interval

Kemampuan Daerah	Persentase kemandirian	Pola hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Harsey dan Blanchard (Halim, Abdul. Akutansi sektor publik akutansi keuangan daerah 2004:189)

Selain menggunakan skala interval Harsey dan Blanchard, ada skala lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan sebagai pembanding. Dengan menggunakan skala interval yang telah dikembangkan oleh Reksohadiprodjo, perhitungan skala kemandirian daerah dapat dihitung dengan menggunakan skala interval berdasarkan persentase berikut:

Tabel. 05 Skala Interval

Persentase	**Kemampuan Keuangan Daerah**
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Reksohadiprodjo (Bahan ajar politik keuangan daerah, 2014:142)

Semakin tinggi persentase kemandirian daerah menunjukan bahwa daerah tersebut semakin mampu untuk membiayai rumah tangga daerah yang

bersangkutan tanpa bergantung dari bantuan pemerintah pusat dalam otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar akan menjadi kontribusi daerah dalam memandirikan suatu daerah, namun apabila persentase dana perimbangan lebih besar dari pendapatan asli daerah maka daerah tersebut dapat dikatakan masih tergantung oleh pusat atau yang disebut dengan instruktif.

Setelah mengetahui tingkat kemandirian suatu daerah berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persentase skala yang telah dijelaskan sebelumnya, hal yang dilakukan berikutnya adalah menelaah dengan menggunakan penelitian lebih mendalam guna mendapatkan hasil. Misalkan suatu daerah tergolong dalam katagori instruktif, maka yang langkah dilakukan berikutnya adalah menggali informasi mengenai rendahnya kemandirian fiskal pada daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan skala interval yang telah dibahas sebelumnya, selanjutnya untuk menganalisis tingkat kemandirian suatu daerah digunakan beberapa formulasi yang sebagaimana telah dikembangkan oleh Reksohadiprodjo (2000), antara lain sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian fiskal daerah

   Perhitungan rasio kemandirian fiskal daerah dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan indikator berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \text{ X } 100\ \%$$

Apabila rasio PAD tergolong katagori rendah maka total dana transfer dari pemerintah pusat akan semakin besar, namun sebaliknya apabila rasio PAD tergolong katagori tinggi maka total dana transfer akan dikurangi oleh pemerintah pusat bahkan jika tidak memungkinkan jumlah total dana transfer akan tetap sama dengan periode yang sebelumnya.

2. Rasio derajat desentralisasi fiskal

   Berdasarkan aspek pendapatan asli daerah, persentase kemandirian fiskal dapat dihitung menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \text{ X } 100\ \%$$

3. Rasio bantuan pemerintah pusat kepada daerah

   Perhitungan rasio melalui indikator bantuan pemerintah pusat atau yang disebut sebagai dana perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Berdasarkan bantuan yang diterima oleh daerah, maka persentase kemandirian fiskal daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \text{ X } 100\ \%$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilanya dalam arti kemandirian daerah yang telah dicapai pada suatu periode ke periode berikutnya. Sedangkan untuk menganalisis pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), penulis menggunakan rumusan yang sebagaimana telah dikembangkan oleh Halim (2004), yakni sebagai berikut:

$$r = \frac{Pn - Po}{Po} \text{ X } 100\ \%$$

Keterangan :

Pn = data tahun ke-n (tahun berakhir)

Po = data tahun ke 0 (tahun awal)

r = pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) digunakan untuk mengetahui persentase laju pertumbuhan kemandirian daerah yang dilihat berdasarkan aspek pendapatan asli daerah. Hal ini diharapkan karena pendapatan asli daerah merupakan pilar pokok dalam desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memandirikan daerah dan tidak hanya bergantung pada bantuan pusat.

Perhitungan rasio sebelumnya merupakan gambaran tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana khususnya dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Semakin tinggi angka rasio

kemandirian daerah maka mengindikasikan semakin rendahnya ketergantungan suatu daerah kepada bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan persentase kemandirian fiskal diatas maka dapat dilihat tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan skala interval yang sebagai mana telah dikembangkan oleh Harsey dan Blanchard.

G. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka teori yang sudah penulis susun, penulis mencoba untuk mengkaji tingkat kemandirian fiskal dua daerah, yakni tingkat kemandirian fiskal Kebupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran. Instrumen yang penulis gunakan dalam mengkaji tingkat kemandirian fiskal kedua kabupaten tersebut penulis menggunakan instrumen pendapatan daerah, dana perimbangan dari pusat untuk daerah, pengeluaran atau belanja daerah yang bersangkutan dan pinjaman daerah.

Berlandaskan instrumen di atas penulis akan menganalisis dua kabupaten yang berbeda dalam satu provinsi. Berdasarkan analisis tersebut maka akan terlihat hasil yang dimana akan menunjukan kedua kabupaten tersebut tergolong dalam kriteria daerah yang instruktif, konsultatif, partisipatif maupun kriteria delegatif dalam sisi keuangan daerahnya. Kerangka pikir penelitian ini, penulis gambarkan dalam bagan berikut:

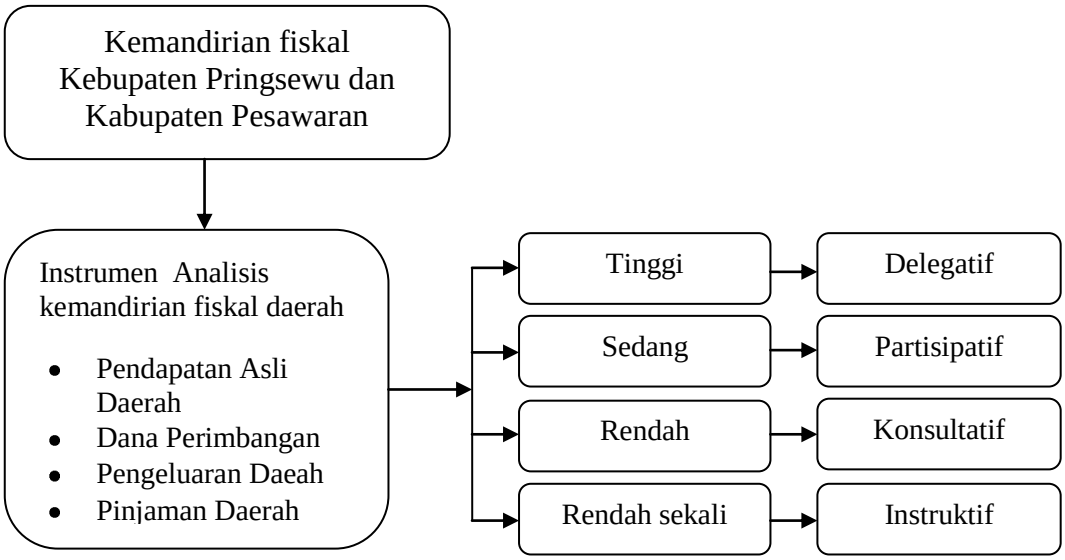

Gambar. 01 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang sifatnya berupa data-data angka dan menganalisis menggunakan statistik.

Penelitian kuantitatif merupakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafah positifisme, yang dimana objek-objek dalam penelitian merupakan penelitian yang kebenarannya bersifat obyektif. Metode ini dapat disebut sebagai metode ilmiah, hal ini dikarenakan penelitiannya berupa data ilmiah yang konkrit, empiris, dan rasional.

Menurut Sugiyono (2012:7) penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel yang kemudian digambarkan atau dijelaskan menggunakan tabel statistik untuk melihat atau membandingkan hasil dari suatu penelitian. Oleh karena itu, penggunaan metode kuantitatif sangatlah tepat dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif berusaha menggambarkan objek penelitian menggunakan angka-angka dan disajikan dalam tabel statistik yang bertujuan agar lebih mudah memahami hasil dari suatu penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi yang berbeda, yakni pada kantor Dispenda dan BPKAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran. Peneliti memilih melakukan penelitian pada dua kabupaten ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana perbandingan tingkat kemandirian daerah yang dilihat berdasarkan analisis fiskal.

Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran adalah dua Kabupaten otonom baru yang beberapa tahun lalu baru berdiri, oleh karena untuk melihat perkembangan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran peneliti mencoba melakukan pendekatan dari segi fiskal untuk melihat kemandirian antara dua kabupaten otonom baru tersebut.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:38), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, yang dimaksud dengan variabel penelitian dalam

penelitian ini adalah segala sesuatu sebagai objek penelitian yang ditetapkan dan dipelajari sehingga memperoleh informasi untuk menarik kesimpulan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel mandiri, tanpa menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain atau tanpa menghubungkan dua variabel atau lebih. Variabel mandiri dalam penelitian ini adalah kemandirian fiskal daerah, namun penelitian ini akan membandingkan variabel mandiri tersebut pada dua daerah, yaitu Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran.

D. Definisi Konseptual

Menurut Sangarimbun dan Efendi (2008:43), definisi konsep adalah suatu pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga dapat memudahkan penelitian untuk mengoperasikan konsep penelitian di lapangan. Pada penelitian ini, definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Kemandirian adalah suatu sikap untuk mandiri dalam menghadapi situasi maupun kondisi dalam lingkungan tanpa bergantung kepada orang lain. Pada akhirnya akan mampu berpikir dan bertindak sendiri dalam mengelola keuangan.
2. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

3. Kemandirian fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Analisis kemandirian fiskal daerah adalah kajian secara mendalam dengan cara menguraikan aspek-aspek penerimaan daerah untuk mengetahui perananya terhadap kemandirian fiskal daerah dalam konteks tidak melepaskan diri seutuhnya dari pemerintah pusat dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

E. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional adalah penentuan kriteria atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan suatu cara tertentu yang digunakan untuk meneliti sehingga mudah dalam melakukan pengukuran maupun perhitungan dalam penelitian. Untuk menganalisis kemandirian fiskal daerah maka digunakan pengukuran menggunakan indikator-indikator yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Indikator-indikator tersebut antara lain yakni:

1. Rasio kemandirian fiskal daerah

   Rasio kemandirian fiskal daerah menunjukan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Perhitungan rasio

kemandirian fiskal daerah dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan formulasi berikut:

a. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah

$$RK : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pusat/Provinsi+ Pinjaman daerah}} \text{ X 100 \%}$$

b. Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

$$RBR : \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \text{ X 100 \%}$$

c. Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

$$RBP : \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \text{ X 100 \%}$$

Rasio tersebut menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin rendah. Rasio kemandirian juga menunjukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakansemakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal

   Kontribusi PAD terhadap kemandirian fiskal daerah dapat diukur dengan:

   a. Jenis penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah
   b. Realisasi penerimaan dari pendapatan asli daerah
   c. Jumlah atau persentase dari pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. berdasarkan aspek pendapatan asli daerah, persentase kemandirian fiskal dapat dihitung menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \text{ X } 100\ \%$$

3. Kontribusi bantuan pemerintah terhadap kemandirian fiskal

   Kontribusi bantuan pemerintah terhadap kemandirian fiskal daerah dapat diukur dengan:

   a. Jenis penerimaan dari bantuan pemerintah propinsi dan bantuan dari pemerintah pusat.
   b. Realisasi penerimaan dari bantuan pemerintah
   c. Jumlah atau persentase dari bantuan pemerintah terhadap total penerimaan daerah. Berdasarkan bantuan yang diterima oleh daerah, maka persentase kemandirian fiskal daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \text{ X } 100\ \%$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilanya dalam arti kemandirian daerah yang telah dicapai pada suatu periode ke periode berikutnya. Sedangkan untuk menganalisis pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), penulis menggunakan rumusan yang sebagaimana telah dikembangkan oleh Halim (2004), yakni sebagai berikut:

$$r = \frac{Pn - Po}{Po} \text{ X } 100\ \%$$

Keterangan :

Pn = data tahun ke-n (tahun berakhir)

Po = data tahun ke 0 (tahun awal)

r = pertumbuhan PAD

Perhitungan rasio diatas merupakan gambaran tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana khususnya dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Semakin tinggi angka rasio kemandirian daerah maka mengindikasikan semakin rendahnya ketergantungan suatu daerah kepada bantuan pemerintah pusat.

F. Jenis Data

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dengan satuan ukuran tertentu dan menunjukan kualitas objek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, antara lain yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian. Data tersebut berupa informasi-informasi yang didapat dari informan melalui pengambilan dokumen. Pada penelitian ini data primer dapat diperoleh peneliti dari wawancara dan dokumen kantor Dispenda dan BPKAD di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran.

2. Data Sekunder

   Data sekunder penelitian di peroleh dari sumber-sumber yang telah tersedia pada instansi terkait. Data sekunder yang dimaksud peneliti berupa dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang merupakan pendukung data primer terkait dengan audit keuangan kabupeten Pringsewu dan Pesawaran periode tahun 2011 hingga tahun 2013.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data agar dapat diteliti, teknik

pengumpulan data diperlukan guna mempermudah peneliti memperoleh data baik data primer maupun data sekunder. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain yaitu:

1. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah metode yang menghasilkan variabel berupa catatan, buku, tulisan, gambar, grafik, dokumen, arsip-arsip, peraturan, maupun kebijakan. Di dalam hal ini arsip atau data-data terkait dengan dokumen yang berhubungan dengan audit keuangan kabupaten Pringsewu dan kabupaten Pesawaran yang beberapa elemenya terdiri dari laporan keuangan seperti, laporan pendapatan daerah, dana perimbangan daerah, pengeluaran daerah, pinjaman daerah dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang dapat mendukung penelitian.

2. Interview (wawancara)

   Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak atau lebih, percakapan yang dimaksud disini dialog yang terjadi antara peneliti sebagai pewawancara dengan stakeholder selaku terwawancara yang memeberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh pewawancara. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada kepala dinas maupun staff Dispenda dan BPKAD di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran.

Pada pelaksanaan pengumpulan data peneliti akan mewanwancarai aktor-aktor yang berhubungan dengan audit keuangan, yaitu kepala dinas maupun staff di kantor Dispenda dan BPKAD di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran.

3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan data atau bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti buku tentang keuangan, buku tentang desentralisasi, buku tentang undang-undang keuangan, jurnal anggaran daerah dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penulis merumuskan pedoman pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 06 Tabel Pedoman Pengumpulan Data

No	Fokus	Sub-indikator	Sumber informasi langsung (wawancara)	Sumber informasi tak langsung (Dokumentasi)
1	Data yang berkaitan dengan pendapatan daerah	• Pendapatan asli daerah • Pajak daerah • Retribusi daerah • Lain-lain pendapatan yang sah • Total penerimaan daerah	Kepala/skretaris/ staff kantor Dispenda dan BPKAD kabupaten Pringsewu dan kabupaten Pesawaran.	Arsip-arsip dokumen APBD yang diperoleh melalui kantor BPKAD dan Dispenda di kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran

2	Data yang berkaitan dengan bantuan pemerintah pusat / provinsi maupun data yang berkaitan dengan dana perimbangan	• Dana bagi hasil • Dana alokasi umum (DAU) • Dana alokasi Khusus (DAK) • Dana bantuan pemerintah pusat • Dana bantuan pemerintah provinsi	Kepala/skretaris/ staff kantor Dispenda dan BPKAD kabupaten Pringsewu dan kabupaten Pesawaran.	Arsip-arsip dokumen APBD yang diperoleh melalui kantor BPKAD dan Dispenda di kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran
3	Data yang berkaitan dengan belanja / pengeluaran daerah	• Belanja langsung • Belanja tidak langsung • Total belanja daerah	Kepala/skretaris/ staff kantor Dispenda dan BPKAD kabupaten Pringsewu dan kabupaten Pesawaran.	Arsip-arsip dokumen APBD yang diperoleh melalui kantor BPKAD dan Dispenda di kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran
4	Data yang berkaitan dengan pinjaman daerah	• Total pinjaman daerah	Kepala/skretaris/ staff kantor Dispenda dan BPKAD kabupaten Pringsewu dan kabupaten Pesawaran.	Arsip-arsip dokumen APBD yang diperoleh melalui kantor BPKAD dan Dispenda di kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran

H. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah. Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian selanjutnya disajikan secara rapih. Yang termasuk dalam proses pengolahan data adalah menghitung rasio kemandirian suatu daerah berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian.

Menurut Singarimbun dan Sofyan Efendi (2006:278), ada beberapa tahapan pengolahan data yang antara lain adalah:

1. Editing data

   Editing adalah proses pengecekan data yang telah terkumpul, hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan pada saat pengumpulan data dilapangan. Proses editing dalam penelitian ini adalah mengoreksi atau memeriksa kembali dokumen yang telah didapatkan dari penelitian.

2. Tabulasi

   Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data-data yang telah didapatkan pada penelitian melalui dokumen. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabulasi dalam penelitian ini adalah dengan memasukan data-data berupa angka kedalam tabel pengelompokan seperti tabel realisai pendapatan, pengeluaran, dana perimbangan agar dapat memudahkan perhitungan dalam menganalisis.

3. Interpretasi data

   Interpretasi data adalah tahapan dimana data yang telah di input dan kemudian dihitung, setelah melalui proses perhitungan barulah data disajikan dalam bentuk tabel untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:243) analisis data adalah proses untuk mencari dan menyususn secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil interview, catatan penelitian, dan dokumentasi dengan cara mengelompokan data kedalam katagori yang kemudian dijabarkan kedalam tabel, selanjutnya mendeskripsikan dari hasil penelitian dan pengolahan data dan membuat kesimpulan penelitian sehingga dapat dipahami oleh penulis maupun pembaca.

Menurut Sugiyono (2012:245), analisa dalam suatu penelitian yang berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang ada pada data penelitian, selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Menurut Bodgan (Sugiyono, 2012:248), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil interview, catatan penelitian, dan dukumen lainya sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara berikut:

1. Menelaah seluruh data atau mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari hasil dokumen, penelitian yang telah ditulis dalam catatan penelitian, dokumen resmi yang telah diperoleh dari instansi terkait, dan lain sebagainya.

2. Menyususun dan menampilkan data hasil dari penelitian
3. Melakukan penafsiran data atau yang sering disebut dengan kesimpulan dari proses analisis dan menafsirkanya dalam bentuk deskriptif yang ditunjang dengan data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang dikumpul dan kemudian ditampilkan dalam uraian yang sistematis untuk mengetahui apakah kebupaten Pringsewu dan kabupaten Pesawaran sudah tergolong sebagai kabupaten yang mandiri atau untuk mengetahui lebih mandiri mana antara kabupaten Pringsewu dan kabupaten Pesawaran pada periode tahun 2011-2013.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Analisis tingkat kemandirian fiskal antara Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran dapat dimulai dengan mengenal terlebih dahulu karakteristik kedua kabupaten tersebut. Sebelum membandingkan dan menganalisis tingkat kemandirian fiskal kedua kabupaten, peneliti mencoba memahami terlebih dahulu memahami gambaran umum dan karakteristik kedua kabupaten dari beberapa aspek. Oleh karena itu, penulisan bab ini diperuntuhkan guna memahami lebih lanjut karakteristik kedua kabupaten yang akan diteliti.

Selain itu, penulisan bab ini juga menjadi langkah awal guna membandingkan kedua kabupaten dari aspek fiskal masing-masing kabupaten dengan didukung oleh data-data berupa dokumen yang relevan, sehingga pembahasan dalam bab ini tidak hanya memberikan gambaran deskriptif, penggambaran umum kedua daerah juga akan memberikan argumen-argumen yang bersumber dari data tersebut.

A. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

1. Gambaran Geografi

Berdasarkan Pringsewu dalam Angka (2015:18), Kabupaten Pringsewu secara geografis terletak pada posisi 104°42’ – 105°8’ Bujur Timur dan antara 5°8’ – 6°8’ Lintang Selatan. Batas wilayah administratif Kabupaten

Pringsewu meliputi yakni, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah. Luas wilayah kebupaten pringsewu hampir semuanya berupa daratan dengan luas wilayah 625 km^2 dan sebagian besar wilayah Pringsewu merupakan wilayah pemanfaatan pertanian.

Berlandaskan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi lampung, Daerah Pringsewu memisahkan diri dari Kabupaten Tanggamus dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Pringsewu dalam angka (2015:19), setelah pemekaran Pj. Bupati Pringsewu untuk pertama kalinya adalah Ir. H. Masdullhaq yang memimpin secara administratif pemerintahan di Kabupaten Pringsewu dan kemudian digantikan oleh H. Helmi Machmud, dan kemudian digantikan kembali oleh Sudarno Edi. Hingga saat ini posisi bupati Pringsewu dijabat oleh Hi. Sujadi Saddat.

Pada awal pembentukan Kabupaten Pringsewu memiliki delapan wilayah kecamatan dan pada tahun 2013, kecamatan di Kabupaten Pringsewu mengalami pemekaran menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan serta 126 desa. Pemekaran tersebut terjadi di Kecamatan Pagelaran menjadi Kecamatan Pagelaran dan Pagelaran Utara. Kecamatan terbesar

di Pringsewu adalah Kecamatan Pagelaran Utara dengan luas wilayah 100.28 km^2 dan Kecamatan Ambarawa merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah 30.99 km^2 (Pringsewu dalam angka, 2015:XXXI). Sembilan kecamatan di Kabupaten Pringsewu antara lain yakni:

Tabel. 07 Nama kecamatan di Kabupaten Pringsewu

No	Nama kecamatan	Ibukota kecamatan	Luas (km^2)
1	Pardasuka	Pardasuka	94,64
2	Ambarawa	Ambarawa	30,99
3	Pagelaran	Gumuk mas	72.47
4	Pagelaran Utara	Fajar mulya	100.28
5	Pringsewu	Pringsewu	53,29
6	Gadingrejo	Gadingrejo	85,71
7	Sukoharjo	Sukoharjo	72,95
8	Banyumas	Banyumas	39,85
9	Adiluwih	Adiluwih	74,82

Sumber : Pringsewu dalam angka, 2015

2. **Gambaran Demografi**

Berdasarkan Pringsewu dalam angka (2015), pada awal pembentukan Kabupaten Pringsewu tercatat memiliki penduduk berjumlah 351.093 jiwa pada tahun 2008. Jumlah penduduk di kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan setiap tahunya, dan pada tahun 2015 tercatat Kabupaten Pringsewu memiliki penduduk 383.101 jiwa yang terdiri dari laki-laki 196.408 jiwa dan perempuan 186.693 jiwa. Dengan sex ratio penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 105,20 yang berarti pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdiri sekitar 105 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk rata-rata sekitar 613 jiwa per kilometer persegi. Secara rinci persebaran penduduk per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel. 08 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km^2)
1	Pardasuka	33 757	357
2	Ambarawa	33 732	1 083
3	Pagelaran	46 038	635
4	Pagelaran Utara	15 196	152
5	Pringsewu	80 443	1 510
6	Gadingrejo	72 249	843
7	Sukoharjo	47 217	647
8	Banyumas	20 068	504
9	Adiluwih	34 401	460
Pringsewu		**383 101**	**613**

Sumber: Pringsewu dalam Angka 2015

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Pringsewu memiliki wilayah terpadat yakni di Kecamatan Pringsewu dengan kepadatan sekitar 1.510 Jiwa/km^2, dan yang paling sedikit penduduk adalah kecamatan Pagelaran Utara dengan kepadatan sekitar 152 Jiwa/km^2 . Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Pringsewu:

Tabel. 09 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Pringsewu

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	18.652	17.638	36.290
5-9	18.401	17.304	35.705
10-14	17.968	17.042	53.010
15-19	17.357	16.734	34.091
20-24	15.373	13.891	29.264
25-29	14.947	13.716	28.663
30-34	15.159	14.415	29.574
35-39	15.400	14.786	30.186
40-44	14.653	13.824	28.477
45-49	12.527	11.956	24.483
50-54	10.587	10.103	20.690
55-59	8.424	7.963	16.387
60-64	6.317	5.454	11.771

65-69	4.104	4.160	8.264
70-74	3.001	3.287	6.288
75+	3.538	4.420	7.958
Jumlah	196.408	186.693	383.101

Sumber : Pringsewu dalam angka, 2015: 33

3. **Gambaran Pendidikan**

Upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyebaran sarana pendidikan secara merata pada semua wilayah. Fasilitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu sudah tersedia mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, kejuruan bahkan perguruan tinggi.

Berdasarkan data Pringsewu dalam angka (2015:59), hingga tahun 2014 jumlah sekolah baik sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Pringsewu tersebar jenjang pendidikan dasar lebih dari 267 sekolah dan pada jenjang sekolah menengah pertama ada 57 sekolah, sedangkan jenjang menengah atas dan kejuaruan kurang lebih berjumlah 52 sekolah. Sedangkan pada jenjang perguruan tinggi ada 9 perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Pringsewu.

Ketersediaan tenaga pengajar dikabupaten Pringsewu berdasarkan data, tenaga pengajar jenjang SD terdapat 2.743 guru, untuk tenaga pengajar jenjang SMP terdapat 1.556 guru, sedangkan pada jenjang SLTA terdapat sekitar 875 guru yang mengajar pada jenjang ini. Sedangkan untuk jumlah murid yang terdaftar di sekolah negeri maupun swasta hingga tahun 2014 terdapat 77.709 siswa/i. Yang antara lain terdaftar pada jenjang SD

terdapat 40.506 siswa, untuk jenjang SMP terdaftar 18.392 siswa. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTA terdaftar 18.811 siswa. Berikut tabulasi jumlah sekolah, guru dan murid di Kabupaten Pringsewu:

Tabel. 10 Jumlah sekolah, guru, murid di Kabupaten Pringsewu

Jenjang	Sekolah	Guru	Murid
SD	267	2.743	40.506
SMP	57	1.556	18.392
SMA	52	875	18.811
PT	9	-	-

Sumber: Pringsewu dalam angka (2015:67)

Berdasarkan data pendidikan, hingga tahun 2014 angkatan kerja di Kabupaten Pringsewu masih didominasi oleh angkatan yang memiliki pendidikan. Angkatan kerja yang terdiri dari berbagai macam tingkat pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berdasarkan tingkatan pendidikan, angkatan kerja yang ada lebih dari 50% masih berpendidikan sekolah dasar sedangkan untuk angkatan kerja yang mempunyai pendidikan sarjana masih berkisar 2,6%. Hal ini mengindikasikan kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Pringsewu masih dirasa minim. Berikut persentase angkatan kerja menurut tingkat pendidikan:

Tabel. 11 Angkatan kerja menurut tingkat pendidikan Kabupaten Pringsewu

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase %
		Laki-laki	Perempuan		
1	Tidak sekolah	1.918	2.081	3.999	2,34
2	SD	42.377	46.301	88.678	52
3	SLTP	16.012	19.800	35.812	21
4	SLTA	16.443	14.253	30.696	18
5	D1, D2, D3	3.847	2.974	6.812	4
6	S1 dan S2	2.431	2.116	4.529	2,66

Sumber : Pringsewu dalam angka (2015:71)

4. Gambaran Perekonomian

Pembangunan Perekonomian adalah serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberi lapangan pekerjaan, meratakan distribusi pendapatan masayarakat dan lain sebagainya. Dengan kata lain tujuan dari pembangunan perekonomian adalah berusaha manaikan pendapatan masyarakat yang disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Berdasarkan pendapat di atas, untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan masyarakat, perlu disajikan data mengenai pendapatan domestik regional bruto. Angka-angka pendapatan regional dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan perekonomian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data informasi kesra dan perekonomian (2015:2) yang diperoleh dari website Kabupaten Pringsewu, Kondisi Perekonomian di Kabupaten Pringsewu hingga tahun 2014 sedikit mengalami perlambatan.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi nasional yang dimana pertumbuhan PDB nasional pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,58% dan di 2014 mengalami penurunan sebesar 5,02%. Pertumbuhan produk domestik regional bruto di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,84%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu terendah di tahun 2014, terdapat pada bidang pertanian yakni mencapai angka 3,26 %. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten pada tahun 2014 terdapat pada bidang jasa perusahaan yakni sebesar 13,38%. Berikut adalah rincian produk domestik regional bruto Kabupaten Pringsewu menurut lapangan usaha:

Tabel. 12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Lapangan Usaha

No.	Lapangan Usaha	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Pertanian	3.53	3.26	3.54	3.26
2	Pertambangan	8.90	8.80	9.79	8.87
3	Industri Pengolahan	4.75	5.59	6.40	5.47
4	Listrik dan Gas	10.04	11.61	10.51	8.80
5	Konstruksi	8.72	8.87	6.29	6.01
6	Perdagangan	6.94	7.16	6.38	6.36
7	Transportasi	8.83	9.90	8.18	8.43
8	Jasa perusahaan	12.31	13.32	13.99	13.38
9	Jasa lainya	5.59	5.15	4.93	5.77

Sumber: Produk domestik regional bruto (2015:48-49)

5. Gambaran Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah memaksa daerah melakukan pengembangan kemampuan keuangan daerahnya. Tidak hanya itu, daerah juga dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber keuangan berdasarkan konsep dan prakarsa sumber daya yang ada didaerah. Kegiatan tersebut dilakukan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya agar dapat terselenggara pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi.

Kabupaten Pringsewu adalah salah satu daerah pemekaran yang ada di Provinsi lampung yang menganut asas otonomi daerah. Atas dasar pemekaran otonomi tersebut menuntut Kabupaten Pringsewu untuk dapat menarik sumber-sumber keuangan berdasarkan prakarsa sumber daya yang ada di Kabupaten Pringsewu.

Komponen-komponen yang berkontribusi dalam pendapatan pemerintah kabupaten pringsewu berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan ketiga komponen tersebut, dana perimbangan merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan pemerintah Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun. Berikut adalah kondisi pendapatan Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun:

Tabel. 13 Pendapatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2014 (dalam juta rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran			
		2011	2012	2013	2014
1	**PAD**	**19.471**	**27.964**	**34.886**	**51.908**
	- Pajak daerah	5.152	7.684	8.476	10.606
	- Retribusi	1.691	1.964	2.446	2.526
	- Hasil pengelolaan kekayaan yg dipisahkan	-	24	34	-
	- Lain-lain PAD	12.627	18.273	23.920	38.776
2	**Dana Perimbangan**	**459.968**	**572.901**	**592.098**	**636.172**
	- DBH	32.424	37.643	35.134	41.317
	- DAU	368.176	443.529	499.454	547.622
	- DAK	59.368	91.917	57.508	47.232
3	**Lain-Lain Pendapatan yg sah**	**31.317**	**29.674**	**20.037**	**180.010**
Total		**611.621**	**738.447**	**784.516**	**868.090**

Sumber: Pringsewu dalam angka (2015:147) dan LGF realisasi anual (2011, 2012, 2013)

Selain dari komponen pendapatan, kemandirian fiskal daerah juga dapat dilihat dari komponen belanja daerah, baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Dari segi fiskal, pengeluaran daerah dapat menjadi acuan dalam desain anggaran periode berikutnya. Selain menjadi pertimbangan APBD berikutnya, komponen belanja daerah juga menjadi salah satu perbandingan dalam aspek pembangunan, yang dimana perbandingan tersebut dilihat dari rasio antara pendapatan dengan pengeluaran daerah sehingga dapat disimpulkan suatu daerah mengalami defisit anggaran atau mengalami surplus anggaran. Berikut data pengeluaran Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun:

Tabel. 14 Pengeluaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2014 (dalam juta rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun Anggaran			
		2011	2012	2013	2014
1	Belanja Langsung	106.283	320.780	166.002	324.793
2	Belanja Tidak Langsung	470.808	532.543	606.324	573661
Total		**577.092**	**725.997**	**772.327**	**898.454**

Sumber: Pringsewu dalam angka (2015:148) dan LGF realisasi anual (2011, 2012, 2013)

B. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran

1. Gambaran Geografi

Kabupaten Pesawaran di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesawaran diresmikan pada tanggal 2 November 2007, yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. Dengan Gedung Tataan sebagai ibukota dari Kabupaten Pesawaran.

Secara geografis wilayah Kabupaten Pesawaran terletak pada posisi 5°10’ – 5°50’ bujur timur dan antara 105° – 105°20’ lintang selatan. Dengan batas-batas wilayah administrasi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Pesawaran dalam angka (2014:IV), setelah pemekaran Pj. Bupati Pesawaran untuk pertama kalinya adalah Haris Fadillah, dan selanjutnya digantikan oleh Djunaidi Djaya, dan digantikan kembali oleh Haris Fadillah, namun kemudian digantikan Untung subroto. Hingga pemilukada untuk yang pertama kalinya menetapkan Aries Sandi Dharma Putra sebagai Bupati pertama Kabupaten Pesawaran dan hingga saat ini posisi Bupati Pesawaran dijabat oleh Dendi Romadhona.

Berdasarkan Pesawaran dalam angka (2014,3), wilayah pesawaran memiliki luas wilayah keseluruhan 117.377 hektar dengan Kecamatan Padang Cermin sebagai kecamatan terluas, yaitu 31.763 hektar. Dari luas keseluruhan Kabupaten Pesawaran tersebut, 13.589 hektar digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisaya yaitu 103.518 hektar merupakan lahan bukan sawah dan lahan pertanian.

Secara administratif Kabupaten Pesawaran memiliki 9 kecamatan yang terdiri dari 144 desa. Topografi wilayah Pesawaran sangat bervariasi mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan ketinggian dari permukaan laut antara 19 hingga 162 meter. 9 kecamatan di Kabupaten antara lain yakni:

Tabel. 15 Nama kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Pesawaran

No	Nama kecamatan	Ibukota kecamatan	Luas (km^2)
1	Punduh Pidada	Bawang	113,19
2	Marga Punduh	Sukajaya Punduh	111
3	Padang Cermin	Wates Way Ratai	317,63
4	Kedondong	Pasar Baru	67
5	Way Khilau	Kubu Batu	64,11
6	Way Lima	Batu Raja	99,83
7	Gedung Tataan	Gedung Tataan	97,06
8	Negeri Katon	Negeri Katon	152,69
9	Tegineneng	Trimulyo	151,26

Sumber : Pesawaran dalam angka, 2014:21

2. **Gambaran Demografi**

Penduduk Kabupaten Pesawaran berdasarkan hasil proyeksi survey penduduk yang dilakukan oleh badan statistika Kabupaten Pesawaran pada tahun 2013, berjumlah 416.372 jiwa yang tercatat pada 103.631 rumah tangga, yang berkomposisikan dari 214.714 penduduk laki-laki dan 201.658 penduduk perempuan.

Berdasarkan Pesawaran dalam angka (2014:53), jumlah pencari kerja di Kabupaten Pesawaran yang terdaftar pada tahun 2013 adalah 726 penduduk laki-laki dan 828 penduduk perempuan. Sedangkan yang belum ditempatkan hingga tahun ini sebanyak 416 penduduk laki-laki dan sebanyak 520 adalah penduduk perempuan.

Tabel. 16 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pesawaran

No	Nama kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km^2)
1	Punduh Pidada	12.926	114,20
2	Marga Punduh	13.042	117,50
3	Padang Cermin	92.951	292,64
4	Kedondong	33.002	492,57
5	Way Khilau	26.202	408,70
6	Way Lima	29.949	300,00
7	Gedung Tataan	92.633	954,39
8	Negeri Katon	63.869	418,29
9	Tegineneng	51.798	342,44
Pesawaran		**416.372**	**3440,73**

Sumber: Pesawaran dalam Angka 2014:55

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Pesawaran terdapat pada kecamatan Padang Cermin, yang berjumlah hingga 92.951 jiwa. sedangkan jumlah penduduk terendah di Kabupaten pesawaran terdapat pada kecamatan Punduh Pidada dengan jumlah penduduk hingga 12.926 jiwa. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Pesawaran:

Tabel. 17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Pesawaran

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	21.435	20.355	41.790
5-9	20.709	19.539	40.248
10-14	20.206	19.095	39.301
15-19	19.217	17.688	36.905
20-24	18.207	15.928	34.135
25-29	17.790	16.288	34.078
30-34	17.402	16.221	33.623
35-39	16.332	15.335	31.667

40-44	14.527	13.832	28.359
45-49	12.607	12.207	24.814
50-54	10.996	10.546	21.542
55-59	8.836	7.898	16.734
60-64	6.139	5.722	11.861
65-69	4.256	4.280	8.536
70-74	3.016	3.079	6.095
75+	3.039	3.645	6.684
Jumlah	**214.714**	**201.658**	**416.373**

Sumber : BPS Kab. Pesawaran (Pesawaran dalam angka, 2014: 57)

3. **Gambaran Pendidikan**

Upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyebaran sarana pendidikan secara merata pada semua wilayah. Fasilitas pendidikan di Kabupaten Pesawaran sudah tersedia mulai dari jenjang taman kanak-kanak, jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, hingga jenjang menengah atas dan kejuruan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesawaran (Pesawaran dalam angka, 2014:69), jumlah taman kanak-kanak (TK) di Kabupaten Pesawaran tersebar hingga 59 sekolah, yang dimana 6 sekolah negeri dan 53 lainya adalah sekolah swasta. Perbandingan jumlah murid dan guru TK di Kabupaten Pesawaran yakni sebanyak 2.160 murid dan guru sebanyak 256 orang.

Data sekolah dasar (SD) di Kabupaten Pesawaran tersebar hingga 308 sekolah, dimana 302 adalah sekolah negeri dan 6 sekolah adalah milik swasta. Perbandingan jumlah murid dan guru sekolah dasar sebanyak 46.464 murid dan jumlah guru sebanyak 3.710 orang.

Jumlah sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Pesawaran memiliki 62 sekolah, di mana 37 merupakan sekolah negeri dan 25 sekolah swasta. Jumlah murid SMP di Kabupaten Pesawaran sebanyak 15.143 murid dengan jumlah guru sebanyak 1.237 orang.

Pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Pesawaran memiliki 20 sekolah, 13 diantaranya adalah sekolah negeri dan 7 sekolah adalah swasta. Sedangkan perbandingan guru dan murid, sebanyak 427 tenaga pengajar dan murid sebanyak 4.781. pada jenjang kejuruan di Kabupaten Pesawwaran memiliki 14 sekolah, 4 sekolah adalah SMK negeri dan 10 sekolah adalah SMK swasta. Jumlah murid dan guru sebanyak 2.587 murid dan guru sebanyak 336 orang.

Selain jenjang pendidikan sebelumnya, Kabupaten Pesawaran juga memiliki lembaga pendidikan islam. Antara lain yakni memiliki 44 RA, 78 adalah jenjang maderasah Ibtidaiyah, 51 sekolah maderasah tsanawiyah, dan 14 sekolah untuk jenjang maderasah aliyah. Berikut tabulasi jumlah sekolah, guru dan murid di Kabupaten Pesawaran:

Tabel. 18 Jumlah sekolah, guru, murid di Kabupaten Pesawaran

Jenjang	Sekolah	Guru	Murid
TK	59	256	2.160
SD	308	3.710	46.464
SMP	62	1.237	15.143
SMA	20	427	4.781
SMK	14	336	2.587

Sumber: Peawaran dalam angka (2014:69)

Berdasarkan tabel tersebut angkatan pendidikan paling banyak adalah pada jenjang sekolah dasar, yakni hingga mencapai 46.464 murid. Sedangkan angkatan pendidikan paling sedikit terdapat pada jenjang pendidikan taman kanak-kanak yakni mencapai 2.160 murid.

4. Gambaran Perekonomian

Pembangunan Perekonomian adalah serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberi lapangan pekerjaan, meratakan distribusi pendapatan masayarakat dan lain sebagainya. Dengan kata lain tujuan dari pembangunan perekonomian adalah berusaha manaikan pendapatan masyarakat yang disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Berdasarkan pendapat diatas, untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan masyarakat, perlu disajikan data mengenai pendapatan domestik regional bruto. Angka-angka pendapatan regional dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan perekonomian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pesawaran dalam angka (2014:289), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesawaran hingga tahun 2013 adalah sebesar 7,69 trilyun rupiah. Sektor pertanian dengan nilai PDRB sebesar 3,88 trilyun rupiah dengan laju pertumbuhan 4,19 memberikan nilai PDRB terbesar di Kabupaten Pesawaran.

Sektor dengan nilai PDRB terbesar kedua di Kabupaten Pesawaran adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan laju pertumbuhan sebesar 6,80. Nilai PDRB sektor ini menyumbang sebesar 1,31 trilyun rupiah. Sektor industri pengolahan dengan laju pertumbuhan sebesar 7,06 dengan nilai PDRB sebesar 940,20 juta rupiah merupakan sektor dengan nilai PDRB terbesar ketiga di Kabupaten Pesawaran. Berikut adalah rincian laju pertumbuhan produk domestik regional bruto Kabupaten Pesawaran menurut lapangan usaha:

Tabel. 19 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Lapangan Usaha

No.	Lapangan Usaha	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	4,25	5,11	4,94	4,19
2	Pertambangan	2,18	2,33	2,27	2,15
3	Industri Pengolahan	8,29	7,18	8,63	7,06
4	Listrik dan Gas	4,11	4,16	3,71	4,54
5	Konstruksi	3,13	3,99	4,19	5,20
6	Perdagangan	7,76	8,11	7,87	6,80
7	Transportasi	10,58	9,99	10,41	8,41
8	Jasa perusahaan	15,78	14,11	12,07	9,70
9	Jasa lainya	7,89	8,68	8,79	8,96

Sumber: Pesawaran dalam angka (2014:291)

5. Gambaran Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah memaksa daerah melakukan pengembangan kemampuan keuangan daerahnya. Tidak hanya itu, daerah juga dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber keuangan berdasarkan konsep dan prakarsa sumber daya yang ada didaerah. Kegiatan tersebut dilakukan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya agar dapat terselenggara pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi.

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu daerah pemekaran yang ada di Provinsi lampung yang menganut asas otonomi daerah. Atas dasar pemekaran otonomi tersebut menuntut Kabupaten Pesawaran untuk dapat menarik sumber-sumber keuangan berdasarkan prakarsa sumber daya yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Komponen-komponen yang berkontribusi dalam pendapatan pemerintah kabupaten pesawaran berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan ketiga komponen tersebut, dana perimbangan merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan pemerintah Kabupaten Pesawaran dari tahun ke tahun. Berikut adalah kondisi pendapatan Kabupaten Pesawaran dari tahun ke tahun:

Tabel. 20 Pendapatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2014 (dalam juta rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran			
		2011	2012	2013	2014
1	**PAD**	**17.916**	**25.710**	**25.933**	**36.482**
	- Pajak daerah	5.672	5.652	6.041	8.154
	- Retribusi	1.608	1.220	1.885	1.854
	- Hasil pengelolaan kekayaan yg dipisahkan	32	136	-	245
	- Lain-lain PAD	10.605	18.701	18.005	26.228
2	**Dana Perimbangan**	**479.063**	**574.542**	**642.231**	**739.876**
	- DBH	37.861	40.562	37.308	35.577
	- DAU	372.577	476.870	538.309	625.845
	- DAK	68.625	57.108	66.613	78.453
3	**Lain-Lain Pendapatan yg sah**	**50.817**	**76.092**	**114.480**	**137.216**
Total		**628.537**	**676.345**	**782.644**	**913.575**

Sumber: Pesawaran dalam angka (2014:281) dan LGF realisasi anual (2011, 2012, 2013)

Selain dari komponen pendapatan, kemandirian fiskal daerah juga dapat dilihat dari komponen belanja daerah, baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Dari segi fiskal, pengeluaran daerah dapat menjadi acuan dalam desain anggaran periode berikutnya. Selain menjadi pertimbangan APBD berikutnya, komponen belanja daerah juga menjadi salah satu perbandingan dalam aspek pembangunan, yang dimana perbandingan tersebut dilihat dari rasio antara pendapatan dengan pengeluaran daerah sehingga dapat disimpulkan suatu daerah mengalami defisit anggaran atau mengalami surplus anggaran. Berikut data pengeluaran Kabupaten Pesawaran dari tahun ke tahun:

Tabel. 21 Pengeluaran Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2014 (dalam juta rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun Anggaran			
		2011	2012	2013	2014
1	Belanja Langsung	268.692	194.887	236.946	No data
2	Belanja Tidak Langsung	268.692	477.504	582.486	No data
Total		**570.373**	**672.391**	**822.432**	**No data**

Sumber: Pesawaran dalam angka (2014:282) dan LGF realisasi anual (2011, 2012, 2013)

Setelah memahami karakteristik dari kedua daerah tersebut maka dapat dipahami bagaimana keadaan kedua daerah dan bagaimana gambara tentang perekonomian. Hal ini dirasa penting sebelum menganalisis kemandirian fiskal, sebab peneliti harus terlebih dahulu memahami gambaran keuangan khususnya APBD di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran tahun 2011-2013 masih rendah dan bantuan dari Pemerintah pusat masih dominan dalam bantuan keuangan daerah di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran. Rincian kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kemandirian fiskal di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran menunjukan hasil yang belum mandiri dengan pola hubungan *Instruktif* dengan perbandingan tingkat kemandirian fiskal masih tinggi di Kabupaten Pringsewu dibandingkan dengan Kabupaten Pesawaran
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Pringsewu lebih unggul dari Kabupaten Pesawaran dengan rata-rata rasio sebesar 3,80 persen pada Kabupaten Pringsewu dan 3,32 persen pada Kabupaten Pesawaran. Dengan angka tersebut menunjukan bahwa kontribusi PAD dirasa masih relatif rendah pada kedua kabupaten.
3. Kontribusi Bantuan Pemerintah terhadap total Pandapatan Daerah di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran relatif cukup besar,

dengan rata-rata rasio sebesar 76,26 persen pada Kabupaten Pringsewu dan 81,06 persen pada Kabupaten Pesawaran. Angka tersebut menunjukan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terhadap Pemerintah Pusat lebih besar dibanding dengan Kabupaten Pringsewu.

4. Rasio Pertumbuhan Kemandirian Fiskal di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran menunjukan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata rasio sebesar 38,24 persen pada Kabupaten Pringsewu dan 29,37 persen pada Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan angka tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan kemandirian fiskal di Kabupaten Pringsewu lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten Pesawaran.
5. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian fiskal Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran antara lain yakni:
    a. Faktor partisipasi masyarakat dalam membayar pungutan dari pemerintah di Kabupaten Pringsewu lebih tinggi dari Kabupaten Pesawaran, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian di Kabupaten Pringsewu lebih tinggi dari Kabupaten Pesawaran.
    b. Faktor Luas wilayah, yang dimana seharusnya Kabupaten Pesawaran dengan luas wilayah dua kali lebih besar dari Kabupaten Pringsewu dapat menggali potensi sumber pendapatan asli daerahnya, namun dikarenakan Kabupaten Pesawaran belum dapat menggali potensi sumber pendapatan asli daerah secara optimal mengakibatkan rendahnya PAD pada kabupaten ini.
    c. Faktor tingginya laju pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto pada Kabupaten Pringsewu mengakibatkan Kemandirian Fiskal

di Kabupaten Pringsewu lebih cepat berkembang dibandingkan dengan Kabupaten Pesawaran. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Pringsewu lebih mandiri dari segi fiskal dibandingkan dengan Kabupaten Pesawaran.

B. Saran

Secara umum Kemandirian Fiskal di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran selalu mengalami peningkatan. Namun masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu peneliti merekomendasikan beberapa saran terkait Kemandirian Fiskal di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran sebaiknya memperbaiki sistem perpajakan daerah, seperti melakukan administrasi penerimaan daerah agar menjamin semua pendapatan terkumpul dengan baik, pelaporan hasil pengumpulan pajak dan retibusi daerah perlu dimonitoring secara efektif sehingga pendapatan dari sektor pajak daerah cukup besar.
2. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran harus lebih optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah agar peningkatan kemandirian fiskal dapat terjadi pada kedua kabupaten.
3. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran sebaiknya mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada msyarakat hingga timbul kesadaran membayar pajak demi pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Yogyakarta; Graha Ilmu

BPS Kabupaten Pesawaran. 2014. Pesawaran Dalam Angka 2014. Pesawaran. Badan Pusat Statistika Daerah Pesawaran

BPS Kabupaten Pringsewu. 2015. Pringsewu Dalam Angka 2015. Pringsewu. Badan Pusat Statistika Daerah Pringsewu

BPS Kabupaten Pringsewu. 2015. Produk Domestic Regional Bruto 2015. Pringsewu. Badan Pusat Statistika Daerah Pringsewu

Darwin. 2010. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta; Mitra Wacana Media

Diskominfo Kabupaten Pringsewu. 2015. Informasi Kesra dan Perekonomian. Pringsewu. Diskominfo Daerah Pringsewu

Ekana, Yana. 2014. Bahan Ajar Politik Keuangan Daerah. Bandar Lampung. Jurusan ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

Gunawan, Ellen & Sitompul Rudy. 1984. Keuangan Negara. Jakarta; Erlangga (Terjemahan dari buku Government Finance Edisi ke 7 karangan Ann F. Friedlaender &John F. Due)

Halim, Abdul. , 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta;* Salemba empat.

Haris, Syamsudin. 2007. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Jakarta; LIPI Pres

Kaho, Josef Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada

MacAndrews, Colin & Amal Ichlasul. 1995. Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan. Jakarta; Raja Grafindo Persada

Mardiasmo. 2003. Perpajakan (edisi refisi). Yogyakarta; ANDI

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Jogyakarta.

Maris, Masri. 1984. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jakarta; Universitas Indonesia (terjemahan dari buku Fincing Local Government in Indonesia karangan Devas Nick)

Nurcholis, Hanif. 2005. Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo)

Reksohadiprodjo. 2000. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah. Yogyakarta; Andi Offset

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung. Alfabeta

Sukirno, Sadono. 2002. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada

Suparmoko. 2000. Keuangan Negara. Yogyakarta; BPFE Yogyakarta

Syamsi, Ibnu. 1994. Dasar-dasar Pelaksanaan Keuangan Negara. Jakarta; Aneka Cipta

Tim Redaksi Fokusmedia. 2006. Keuangan Negara. Bandung; Fokusmedia

Tim Redaksi Fokusmedia. 2008. Otonomi Daerah 2008. Bandung; Fokusmedia

Widjaja, Haw. 2014. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta. Rajawali Pers

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada

Penelitian Terdahulu

Hamawansyah, Fadhillah. Analisis Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Lubuklinggau Dalam Menunjang Penguatan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011)

Sinaga, Delviana. 2008. Analisis Kemandirian Fiskal Kota Bandar Lampung Tahun 2008-20010. Palembang. Universitas Sriwijaya

Dokumen

Data Anggaran, Perubahan dan Realisasi APBD Tahun 2011-2014. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu

LGF Realisasi Anggaran Anual Tahun 2011. Kementrian Keuangan. Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan

LGF Realisasi Anggaran Anual Tahun 2012. Kementrian Keuangan. Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan

LGF Realisasi Anggaran Anual Tahun 2013. Kementrian Keuangan. Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan

Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2011-2014. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu

Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2011-2014. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran

Undang-Undang:

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Permendagri nomor 59 tahun 2007

Website:

http://djpk.depkeu.go.id

http://pnri.go.id

http://digilib.unila.ac.id